



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, DAN INDUSTRI)**

- Tahun Sidang : 2021- 2022
Masa Persidangan : IV
Rapat : Ke – 11 (Sebelas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan Dirut PT Pertamina (Persero)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d 18.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan *virtual*
Acara :
1. Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap harga dan penyaluran BBM di dalam negeri.
2. Mekanisme Distribusi kuota dalam mengatasi kelangkaan solar.
3. Kenaikan harga LPG non subsidi.
4. Lain-lain
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, SH., MH
(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti
Hadir : A. Pemerintah
1. Dirjen Migas KESDM RI
2. Kepala BPH Migas
3. Dirut PT Pertamina (Persero)
B. 34 Orang Anggota dari 53 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:
19 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
15 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
19 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 29 Maret 2022 dibuka pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH., MH, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap harga dan penyaluran BBM di dalam negeri.
 - b. Mekanisme Distribusi kuota dalam mengatasi kelangkaan solar.
 - c. Kenaikan harga LPG non subsidi.
 - d. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menjaga pasokan dan distribusi BBM solar dan LPG subsidi agar tepat sasaran dengan memperhatikan kebutuhan daerah secara proporsional.
2. Komisi VII DPR RI sepakat untuk melakukan penambahan kuota solar subsidi sebesar 2 juta kL menjadi 17 juta kL serta penambahan kuota minyak tanah sebesar 100 ribu kL menjadi 600 ribu kL berdasarkan kondisi *real* di lapangan atas paparan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) dan selanjutnya akan diagendakan pembahasan dengan Menteri ESDM RI.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan melakukan penindakan tegas atas penyalahgunaan BBM bersubsidi khususnya solar.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah agar kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) yang bernilai sekitar Rp 100 Triliun dapat segera dibayarkan guna mencegah krisis likuiditas PT Pertamina (Persero) yang dapat mengganggu pengadaan dan penyaluran BBM Nasional.
5. Komisi VII DPR RI mendukung perubahan komposisi pemberian subsidi dan kompensasi BBM dengan meningkatkan porsi subsidi BBM yang lebih besar.

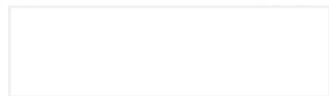
6. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk segera menyiapkan *roadmap* dan infrastruktur *Strategic Petroleum Reserves* (SPR) guna menciptakan cadangan BBM nasional dalam menunjang ketahanan energi nasional.
7. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyiapkan analisa sensitivitas kenaikan harga BBM terhadap beban subsidi guna menyiapkan strategi-strategi dalam mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan gas dunia selambat-lambatnya pada tanggal 13 April 2022 dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI.
8. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk membuat laporan terkait pengawasan, pelaporan, dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi untuk disampaikan kepada Komisi VII DPR RI setiap bulannya.
9. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 5 April 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.00 WIB

Jakarta, 29 Maret 2022

**DIRJEN MIGAS
KEMENTERIAN ESDM RI**



Prof. Dr. TUTUKA ARIADJI

KETUA RAPAT,



H. EDDY SOEPARNO, SH., MH
A-496

KEPALA BPH MIGAS



ERIKA RETNOWATI, Ak.M.Si

**DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA (PERSERO)**



NICKE WIDYAWATI